



**CONTOH**  
**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENGEMBANGAN APLIKASI EVALUASI ANGGARAN**  
**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**2022**

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Dasar Hukum	5
BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	6
2.1. Sasaran Strategi Unit Kerja	6
2.2. Peta Jalan Implementasi Program TIK (SPBE) di Unit Kerja	6
BAB III PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SPBE INSTANSI	7
3.1. Pembangunan/Pengembangan Proses Bisnis (RAB)	7
3.2. Pembangunan/Pengembangan Data dan Informasi (RAD)	7
3.3. Pembangunan/Pengembangan Layanan SPBE (RAL)	7
3.4. Pembangunan/Pengembangan Aplikasi SPBE (RAA)	7
3.5. Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur SPBE (RAI)	7
3.6. Pembangunan/Pengembangan Keamanan SPBE (RAK)	7
BAB IV IMPLEMENTASI	8
4.1. Ruang Lingkup Pekerjaan	8
4.2. Spesifikasi Teknis	8
4.3. Metode Implementasi	8
4.4. Lokasi Implementasi	8
4.5. Periode Implementasi	8
LAMPIRAN	9

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

*[Penjelasan mengenai latar belakang kebutuhan akan pengadaan atau pengembangan SPBE / belanja TIK pada unit kerja]*

### **Contoh:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dilaksanakan secara terpadu terhadap unsur-unsur SPBE Kemendikbudristek yang terdiri atas arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan dan layanan SPBE Kemendikbudristek. Peyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian dikonsolidasikan dan direviu oleh pengelola SPBE Kementerian sesuai dengan arsitektur dan peta jalan SPBE Kementerian.

Dalam penyusunan, penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA terdapat ketentuan bahwa untuk kegiatan atau proyek K/L berupa: (1) pembangunan/pengadaan sistem IT baru atau aplikasi baru yang bersifat umum;(2) pengadaan server baru dan/atau pusat data (data center) baru (DC/DRC); dan (3) Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, harus mendapatkan rekomendasi (clearance) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan/atau Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pusdatin sebagai unit pengelola SPBE Kemendikbudristek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi (Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021), harus melakukan konsolidasi dan reviu anggaran SPBE Kementerian untuk meningkatkan efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan SPBE Kementerian. Selain hal tersebut, Pusdatin juga memfasilitasi pendampingan teknis kepada unit kerja dalam pengajuan clearance anggaran TIK kepada KemenPANRB. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan sistem informasi untuk proses evaluasi anggaran TIK Kementerian.

## 1.2. Identifikasi Masalah

*[Penjelasan mengenai identifikasi masalah yang akan ditangani dengan adanya pengadaan atau pengembangan SPBE / belanja TIK pada unit kerja]*

**Contoh:**

Belum adanya aplikasi yang fungsinya untuk mengakomodir usulan pengadaan TIK (SPBE) pada lingkup Kemdikbudristek yang perlu di-clearance;

**1.3. Maksud dan Tujuan**

*[Penjelasan maksud dan tujuan dilakukan pengadaan atau pengembangan SPBE / belanja TIK pada unit kerja]*

**Contoh:**

**Maksud** pekerjaan ini adalah:

Untuk melakukan Pembuatan Aplikasi untuk melakukan reviu dan konsolidasi pengadaan TIK di lingkungan Kemendikbud.

**Tujuan** pekerjaan ini adalah :

Mengembangkan sistem informasi evaluasi anggaran TIK di lingkungan Kemendikbudristek dengan konsep *online document approval system*.

**1.4. Dasar Hukum**

*[dasar hukum yang mendukung pengadaan atau pengembangan SPBE / belanja TIK pada unit kerja]*

**Contoh:**

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi;
- f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- i. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

- j. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- l. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian; dan Teknologi Nomor Tahun 2022 tentang
- p. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset
- q. Surat Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan No. S-118/AG/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Penjelasan Kriteria Rekomendasi (Clearance) Belanja TIK.

## BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

*[Penjelasan arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan dan pengembangan SPBE instansi memperhatikan keselarasan **Rencana Strategis Kementerian (mengacu pada Permendikbudristek No. 22 tahun 2020 atau pembaruannya Permendikbudristek No. 13 tahun 2022)** dan peta jalan implementasi program TIK di unit kerja.]*

### **2.1. Sasaran Strategi Unit Kerja**

*[Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian atau Peta Jalan Program terkait]*

#### **Contoh:**

Pengembangan aplikasi SEPIA ditujukan untuk mendukung program Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan dengan sasaran meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK terutama dalam peningkatan nilai indeks SPBE Kemendikbudristek.

### **2.2. Peta Jalan Implementasi Program TIK (SPBE) di Unit Kerja**

*[Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian atau Peta Jalan Program terkait]*

#### **Contoh:**

Implementasi Permendikbudristek no.8 tahun 2022 tentang SPBE Kementrian, ditargetkan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sesuai dengan hasil rapat Tim Koordinasi SPBE pada 19 April 2022, pelaksanaan reviu dan konsolidasi anggaran dimulai pada tahun 2022 untuk Tahun Anggaran 2023.

## **BAB III PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SPBE INSTANSI**

### **3.1. Pembangunan/Pengembangan Proses Bisnis (Rancangan Arsitektur Proses Bisnis/RAB)**

- *Pembangunan/Pengembangan SPBE ditujukan untuk mendukung proses bisnis kementerian.*
- *Setiap unit kerja yang mengusulkan pembangunan/pengembangan program inisiatif TIK harus dapat menjelaskan proses bisnis yang didukung (inisiatif TIK sebagai otomasi atau penguangkit keberhasilan proses bisnis unit kerja)*
- *Arsitektur proses bisnis mengacu pada Referensi Arsitektur Bisnis SPBE Nasional dan proses bisnis Kementerian (berdasarkan Kepmen Nomor 55/0/2022 Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi)*
- *mengacu pada  **Matriks Arsitektur Proses Bisnis***

#### **Contoh:**

Aplikasi SEPIA mendukung proses bisnis PDK-06 tentang Pengelolaan Data, Teknologi Informasi, dan Media Pendidikan dan Kebudayaan pada sub proses bisnis PDK-06.01 Tata Kelola TIK sesuai tugas Pusdatin sebagai pengelola SPBE Kementerian untuk melakukan verifikasi anggaran TIK Kementerian bersama dengan Biro Perencanaan sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-118/AG/2022 tentang Penjelasan Kriteria Rekomendasi Clearance Belanja TIK.

### **3.2. Pembangunan/Pengembangan Layanan SPBE (Rancangan Arsitektur Layanan/RAL)**

- *Rancangan Arsitektur Layanan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan yang dihasilkan dari tiap proses bisnis Kementerian.*
- *Arsitektur Layanan mengacu pada Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional dan arsitektur Layanan SPBE Kementerian*
- *Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional meliputi layanan administrasi pemerintah dan layanan publik.*
- *Untuk layanan SPBE Kementerian dapat didefinisikan sesuai dengan proses bisnis yang diampu oleh Unit Kerja*
- *mengacu pada  **Matriks Arsitektur Layanan SPBE***

#### **Contoh :**

Arsitektur layanan aplikasi SEPIA yang berfungsi sebagai Sistem Aplikasi Anggaran SPBE Kemendikbudristek pada Referensi Arsitektur

Layanan SPBE Nasional berada pada RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan dan dijelaskan pada RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi yang mendukung proses bisnis PDK-06.01 Tata Kelola TIK.

Aplikasi SEPIA berfungsi sebagai layanan pengajuan rekomendasi (clearance) kegiatan atau proyek terkait belanja teknologi informasi dan komunikasi yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan kriteria dan prinsip SPBE Kementerian.

### **3.3. Pembangunan/Pengembangan Data dan Informasi (Rancangan Arsitektur Data dan Informasi/RAD)**

- *Rancangan arsitektur Data menjelaskan tentang data yang dihasilkan atau dibutuhkan oleh program inisiatif TIK yang diusulkan (terutama untuk aplikasi).*
- *Arsitektur Data dan Informasi mengacu pada Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE Nasional, untuk arsitektur Data dan Informasi SPBE Kementerian dapat didefinisikan sesuai dengan data yang dihasilkan atau dibutuhkan oleh Layanan SPBE Unit Kerja*
- *mengacu pada [Matriks Arsitektur Data dan Informasi](#)*

#### **Contoh:**

Data Rekomendasi Anggaran TIK Kemendikbudristek yang dihasilkan oleh aplikasi SEPIA sebagai Sistem Aplikasi Anggaran SPBE Kemendikbudristek pada Referensi Arsitektur Data SPBE Nasional terletak pada Data Pokok RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum dan Data Tematik RAD.09.02 Data Keuangan; data ini bersifat Rahasia dan akan dilakukan reviu oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal beserta Pusat Data dan Teknologi Informasi.

### **3.4. Pembangunan/Pengembangan Aplikasi SPBE (Rancangan Arsitektur Aplikasi/RAA)**

- *Rancangan Arsitektur Aplikasi menjelaskan tentang jenis aplikasi dari program inisiatif TIK yang diusulkan.*
- *Arsitektur Aplikasi mengacu pada Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional, yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus.*
- *Aplikasi SPBE Kementerian terbagi menjadi tiga:*
  - A. *Aplikasi Umum*
    - *Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.*
    - *Aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan pada bidang:*
      1. *Perencanaan;*

2. Penganggaran;
3. Akuntabilitas Kinerja;
4. Pemantauan dan Evaluasi;
5. Kepegawaian.

#### B. Aplikasi Umum (Aplikasi Sejenis)

- Aplikasi Sejenis adalah Aplikasi Umum yang telah dikembangkan dan dimanfaatkan oleh unit kerja sebelum adanya Aplikasi umum bidang yang sama ditetapkan oleh kementerianRB
- Membangun dan/atau mengembangkan aplikasi umum yang telah ditetapkan oleh KemenpanRB, yaitu pada bidang:
  1. Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LPSE),
  2. Pengaduan Pelayanan Publik (SPAN-LAPOR)
  3. Kearsipan dan tata Naskah Dinas (SRIKANDI)
  4. Evaluasi Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (EGA)

#### C. Aplikasi Khusus

- Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah (IPPD) tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
- Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan IPPD lain, untuk mendukung misi tertentu. Contohnya : Platform Digital Pendidikan.
- Aplikasi Khusus Misi Tertentu adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi IPPD lain. Contohnya [amanbersama.kemdikbud.go.id](http://amanbersama.kemdikbud.go.id) dan [kuotadikti.kemdikbud.go.id](http://kuotadikti.kemdikbud.go.id) (website kuota belajar, sekarang sudah tidak ada karena program sudah berhenti)
- mengacu pada  **Matriks Arsitektur Aplikasi**

#### **Contoh:**

Arsitektur Aplikasi pada Aplikasi SEPIA menggunakan Referensi Arsitektur SPBE Nasional merujuk pada RAA.01 Aplikasi Umum, dengan level 2 merujuk pada RAA.01.02 yaitu Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan. Untuk level 3 merujuk pada RAA.01.02.09 yaitu Aplikasi Data dan Informasi Pemerintahan.

Aplikasi SEPIA merupakan Aplikasi Umum Sejenis yang melayani pengajuan rekomendasi (clearance) kegiatan atau proyek terkait belanja teknologi informasi dan komunikasi yang bersumber dari

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan kriteria dan prinsip SPBE Kementerian.

### **3.5. Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur SPBE (Rancangan Arsitektur Infrastruktur / RAI)**

- *Rancangan Arsitektur Infrastruktur menjelaskan tentang komponen infrastruktur dari program inisiatif TIK yang diusulkan.*
- *Arsitektur Infrastruktur mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Nasional, yaitu Jaringan Intra Pemerintah, Pusat Data, Sistem Penghubung Layanan Kementerian (SPLP)*
- *mengacu pada **Matriks Arsitektur Infrastruktur***
- *Kebutuhan infrastruktur untuk mendukung program inisiatif TIK Unit Kerja diusulkan untuk difasilitasi oleh Pusdatin*
- *detail kebutuhan infrastruktur sesuai dengan Arsitektur SPBE*

#### **Contoh:**

Infrastruktur yang mendukung aplikasi SEPIA sebagai Sistem Aplikasi Anggaran SPBE Kemendikbudristek pada Referensi Arsitektur SPBE Nasional merujuk pada RAI.03 Platform, dengan menggunakan teknologi awan yaitu RAI.03.02 dan merupakan Infrastruktur as a Service RAI.03.02.02.

Infrastruktur untuk aplikasi SEPIA ini merupakan infrastruktur teknologi awan on premise (dikelola sendiri) di Data Center Kemendikbudristek yang disediakan oleh Pusdatin.

### **3.6. Pembangunan/Pengembangan Keamanan SPBE (Rancangan Arsitektur Keamanan/RAK)**

- *Rancangan Arsitektur Keamanan menjelaskan tentang komponen keamanan dari program inisiatif TIK yang diusulkan.*
- *Arsitektur Keamanan mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan SPBE Nasional dan kebijakan SMKI Kementerian.*
- *Struktur RAK SPBE Nasional terbagi menjadi dua tingkat, yaitu:*
  - 1. Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan uji kelaikan keamanan, sebagai RAK tingkat 1 (pertama); dan*
  - 2. Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).*

#### **Contoh:**

Arsitektur Keamanan pada Aplikasi SEPIA menggunakan keamanan infrastruktur (firewall), uji kelaikan keamanan (Penetration Testing) dan menggunakan Secure Sockets Layer (SSL)

## BAB IV IMPLEMENTASI

### 4.1. Ruang Lingkup Pekerjaan

*Ruang Lingkup Pekerjaan menjelaskan tentang Batasan Pekerjaan yang akan dilakukan.*

Contoh :

Ruang lingkup kegiatan Pembuatan Aplikasi Evaluasi Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang terdiri atas beberapa tahapan berikut:

1. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Evaluasi Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Instalasi dan Konfigurasi server database dan web server Aplikasi Evaluasi Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Membuat manual book (buku panduan) cara penggunaan
4. Membuat laporan pekerjaan

Hasil yang diharapkan adalah sebuah aplikasi berbasis web dengan konsep *online document approval system* untuk optimalisasi pengembangan inisiatif TIK Kemdikbud dengan memudahkan pengajuan, persetujuan, dan monitoring pengembangan inisiatif TIK satker Kemdikbudristek.

### 4.2. Spesifikasi Teknis

*Spesifikasi Pekerjaan menjelaskan tentang Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang akan dilakukan.*

- A. Spesifikasi Aplikasi Evaluasi Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (EGA SPBE) adalah sebagai berikut :
- Basis Aplikasi : Web
  - Database yang digunakan : MySQL
  - Operating System : Linux Ubuntu 20.04
  - Bahasa Pemrograman : PHP
  - Framework Aplikasi : Codeigniter

Fitur-fitur yang akan diterapkan dalam Pembuatan Aplikasi Evaluasi Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebagai berikut:

#### 1. Aksesibilitas

Aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui tablet ataupun laptop di manapun dengan menggunakan koneksi internet.

Akses pengguna dan privilege dibedakan menjadi kategori:

- a. Super Administrator
- b. Administrator
- c. Unit Kerja
- d. Verifikator (Eselon 1)
- e. Validator KRO-RO (Biro Perencanaan)

- f. Penelaah (Team Clearance)
  - g. Tim Koordinasi SPBE
2. Halaman Login
    - a. Login akun
    - b. Pengajuan akun
    - c. Lupa password
  3. Dashboard Pengguna
    - a. Jadwal Pelaksanaan Evaluasi Anggaran SPBE
    - b. Statistik Evaluasi
    - c. Statistik Proses Pengajuan dan Proses Verifikasi
    - d. Grafik Pengajuan berdasarkan Instansi
    - e. Grafik Persebaran Area Arsitektur SPBE
    - f. Pencarian data anggaran
  4. Pengaturan Akun Pengguna
    - a. Pengaturan profil pengguna
    - b. Ubah kata sandi / password
    - c. Logout akun
  5. Master Data
    - a. Tambah, Edit, Hapus Daftar Instansi/unit kerja
    - b. Tambah, Edit, Hapus Daftar Program
    - c. Tambah, Edit, Hapus Daftar Taksonomi Proses Bisnis
    - d. Tambah, Edit, Hapus Daftar Taksonomi Data dan Informasi
    - e. Tambah, Edit, Hapus Daftar Taksonomi Layanan
    - f. Tambah, Edit, Hapus Daftar Taksonomi Aplikasi
    - g. Tambah, Edit, Hapus Daftar Taksonomi Infrastruktur
    - h. Tambah, Edit, Hapus Daftar Taksonomi Keamanan
  6. Clearance
    - a. Pengajuan Clearance Tahun Anggaran Berikutnya (T+1)
    - b. History Pengajuan
    - c. Status Pengajuan
    - d. Tambah, Edit, Hapus Clearance
    - e. Pencarian data clearance berdasarkan Header Tabel
    - f. Verifikasi Clearance
    - g. Rekomendasi Clearance
    - h. Detail Program Kegiatan
    - i. Sortir Kegiatan berdasarkan Header Tabel
    - j. Form Pengajuan Clearance
    - k. Unggah dokumen pendukung

B. Spesifikasi teknis kebutuhan minimum Infrastruktur :

- a. Minimal Memory 4 GB
- b. Minimal Storage 100 GB
- c. Minimal Central Processing Unit (CPU) 4 Core
- d. Dapat berjalan di Operating System berbasis Linux
- e. Dapat berjalan di infrastruktur berbasis cloud computing
- f. 1 (satu) buah IP Publik

- g. 1 (satu) buah IP Private

### 4.3. Metode Implementasi

*Metode Implementasi menjelaskan tentang Metode Implementasi pengembangan/pengadaan TIK yang akan dilakukan.*

Pelaksanaan pengadaan Pembuatan Aplikasi Evaluasi Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan oleh Pihak Ketiga, secara umum sebagai berikut:

1. Perencanaan dan perancangan sistem
2. Perancangan database
3. Pengembangan sistem
4. Konfigurasi database dan sistem
5. Uji coba sistem
6. Perbaikan sistem
7. Laporan dan dokumentasi

### 4.4. Lokasi Implementasi

*Lokasi Implementasi menjelaskan tentang Lokasi Implementasi pengembangan/pengadaan TIK yang akan dilakukan.*

Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikbudristek

Jalan R.E. Martadinata Km 5.5

Ciputat, Tangerang Selatan

### 4.5. Periode Implementasi

*Periode Implementasi menjelaskan tentang Periode Implementasi pengembangan/pengadaan TIK yang akan dilakukan.*

Implementasi pekerjaan ini dilakukan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender, dengan jadwal sebagai berikut:

No	Keterangan	Minggu I							Minggu II							Minggu 3						
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan dan perancangan sistem																					
2	Perancangan database																					
3	Pengembangan sistem																					

4	Konfigurasi database dan sistem																			
5	Uji coba sistem																			
6	Perbaikan sistem																			
7	Laporan dan dokumentasi																			

## **LAMPIRAN**

**pada lampiran, dicantumkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Detail Kebutuhan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya**

# LAMPIRAN

## TAKSONOMI REFERENSI ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

### Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB - 01)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
<b>Pertahanan dan Luar Negeri (01)</b>		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan, intelijen, penanggulangan ancaman, pertahanan siber.
01.02	Urusan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
<b>Ekonomi dan Industri (02)</b>		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri, termasuk di dalamnya ketahanan industri, pengelolaan struktur industri, pengelolaan standar nasional, penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital, dan pengelolaan iklim usaha.
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pengelolaan perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, pemberdayaan konsumen, standardisasi dan pengendalian mutu, serta perdagangan berjangka.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, ketahanan pangan, serta karantina dan keamanan

		hayati.
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan termasuk di dalamnya pengelolaan tanaman perkebunan, keberlanjutan usaha perkebunan, pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan, dukungan terhadap ketahanan pangan, dan pengembangan bio energi.
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan termasuk di dalamnya benih dan bibit ternak, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen peternakan, produksi pakan dan ternak, perikanan budidaya, dan dukungan terhadap ketahanan pangan.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan termasuk di dalamnya karantina perikanan, pengelolaan hasil perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan dukungan terhadap ketahanan pangan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pengelolaan badan usaha milik negara termasuk di dalamnya keberlanjutan badan usaha milik negara, dan penguatan daya saing dan kesinergian badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal antara lain manajemen penanaman modal, manajemen perizinan penanaman

		<b>modal, dan litigasi penanaman modal.</b>
<b>02.09</b>	<b>Koperasi</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi termasuk di dalamnya kelembagaan koperasi, pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi, pemberdayaan dan pembiayaan koperasi, serta pengawasan koperasi.</b>
<b>02.10</b>	<b>Usaha Kecil Dan Menengah</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan usaha kecil dan menengah termasuk di dalamnya kelembagaan, pengelolaan produksi dan pemasaran, serta pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.</b>
<b>02.11</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan dan penyusunan rencana induk kepariwisataan nasional.</b>
<b>Pembangunan Kewilayahan (03)</b>		
<b>03.01</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum, pembinaan jasa konstruksi, pengelolaan air limbah domestik, dan pengelolaan sumber daya air.</b>
<b>03.02</b>	<b>Transmigrasi</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kawasan transmigrasi.</b>
<b>03.03</b>	<b>Transportasi</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi termasuk di dalamnya pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi, dan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.</b>

<b>03.04</b>	<b>Perumahan</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, dan penyelenggaraan perumahan.</b>
<b>03.05</b>	<b>Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, termasuk di dalamnya pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan daerah tertentu.</b>
<b>03.06</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan termasuk di dalamnya kebijakan hukum</b>

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur</b>
		<b>pertanahan, kebijakan pengadaan tanah, tata ruang tanah, litigasi pertanahan dan pengelolaan infrastruktur pertanahan.</b>
<b>03.07</b>	<b>Kependudukan</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan termasuk di dalamnya pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.</b>
<b>Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)</b>		
<b>04.01</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan termasuk di dalamnya kefarmasian dan alat kesehatan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, Program Pencegahan,</b>

		<b>Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta pengawasan obat dan makanan.</b>
<b>04.02</b>	<b>Sosial</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial termasuk di dalamnya manajemen pencarian dan pertolongan, manajemen sosial, pembangunan manusia, penanganan fakir miskin, dan penanggulangan bencana.</b>
<b>04.03</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan termasuk di dalamnya kesetaraan gender, perlindungan anak, perlindungan hak perempuan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.</b>
<b>Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)</b>		
<b>05.01</b>	<b>Hukum</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum termasuk di dalamnya peraturan dan perundang-undangan, pengelolaan masyarakat, penyelenggaraan keimigrasian, dan penyelenggaraan peradilan.</b>
<b>05.02</b>	<b>Keamanan</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan termasuk didalamnya ketentraman, ketertiban umum, pengayoman masyarakat, penanggulangan transnasional dan terorisme, dan penegakan hukum.</b>
<b>05.03</b>	<b>Hak Asasi Manusia</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak atas kekayaan intelektual.</b>
<b>Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)</b>		

<b>06.01</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan termasuk di dalamnya manajemen tenaga pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan vokasi, dan pembinaan kepastakaan.</b>
<b>06.02</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan termasuk di dalamnya manajemen</b>

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur</b>
		<b>pekerja migran Indonesia serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.</b>
<b>06.03</b>	<b>Ilmu Pengetahuan</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya penelitian ilmu dasar, penelitian inter dan multi disiplin, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan sektor tertentu, pengkordinasian sistem nasional ilmu pengetahuan.</b>
<b>06.04</b>	<b>Teknologi</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang teknologi termasuk di dalamnya pengelolaan invensi dan invasi, penginderaan jauh, teknologi penerbangan dan antariksa, tenaga nuklir, pengkajian dan penerapan teknologi, pengkordinasian sistem nasional teknologi.</b>
<b>06.05</b>	<b>Pemuda</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.</b>
<b>06.06</b>	<b>Olahraga</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang</b>

		keolahragaan termasuk di dalamnya pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
<b>Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)</b>		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan termasuk di dalamnya geologi, sumber daya mineral seperti batubara, minyak, dan gas bumi.
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi termasuk di dalamnya energi baru dan terbarukan, ketenagalistrikan, serta konservasi energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan termasuk di dalamnya pengelolaan hutan dan hasilnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung serta perlindungan kawasan hutan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan termasuk di dalamnya kemaritiman, tata ruang laut, pemberdayaan masyarakat kelautan, dan sumber daya kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya alam dan ekosistem, pelestarian lingkungan hidup, manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca.
<b>Budaya dan Agama (08)</b>		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama termasuk di dalamnya bimbingan masyarakat keagamaan, pendidikan agama dan

		<p>pelatihan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umroh, serta sertifikasi produk halal.</p>
08.02	Kebudayaan	<p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan termasuk di dalamnya kesejarahan, pelestarian cagar budaya, manajemen budaya,</p>

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>pengembangan sastra Indonesia, dan pembinaan perfilman nasional.</p>
<b>Pemerintahan Umum (09)</b>		
09.01	Dalam Negeri	<p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam urusan dalam negeri termasuk di dalamnya kebijakan politik dan pemerintahan umum, pembinaan otonomi daerah, pemerintahan daerah, pembinaan keuangan daerah, dan pelaksanaan program prioritas nasional terkait pembinaan di daerah.</p>
09.02	Keuangan	<p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara termasuk di dalamnya fiskal, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan, manajemen perekonomian, pengadaan dan manajemen aset, serta pengelolaan pajak.</p>
09.03	Informasi	<p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi termasuk di dalamnya pengelolaan sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan informasi publik, penyelenggaraan informatika, tata kelola aplikasi informatika, pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.</p>

09.04	<b>Komunikasi</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi termasuk di dalamnya pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos, serta penyelenggaraan pos.</b>
09.05	<b>Perencanaan Pembangunan Nasional</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan, strategi pembangunan nasional, pengelolaan program kerja organisasi, dan dukungan strategis program/kebijakan.</b>
09.06	<b>Aparatur Negara</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di dalamnya pengelolaan dukungan organisasi, manajemen aparatur sipil negara, kelembagaan, pembinaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, manajemen pelayanan publik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, kearsipan nasional, dan pengawasan aparatur negara.</b>
09.07	<b>Kesekretarian Negara</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sekretariat negara termasuk di dalamnya kerumahtanggaan kepresidenan, koordinasi dengan lembaga negara, ketahanan nasional, manajemen pimpinan tinggi, pengawasan pemerintahan, pengkajian strategis, dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan.</b>

## Taksonomi Referensi Arsitektur Data Dan Informasi (RAD - 02)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
<b>Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)</b>		
01.01	Data pertahanan	Data yang mempresentasikan bidang pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan, intelejen, penanggulangan ancaman, pertahanan siber.
01.02	Data urusan luar negeri	Data yang mempresentasikan bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
<b>Informasi Ekonomi dan Industri (02)</b>		
02.01	Data industri	Data yang mempresentasikan bidang pengelolaan industri, termasuk di dalamnya ketahanan industri, pengelolaan struktur industri, pengelolaan standar nasional, penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital, dan pengelolaan iklim usaha.
02.02	Data perdagangan	Data yang mempresentasikan pengelolaan perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, pemberdayaan konsumen, standardisasi dan pengendalian mutu, serta perdagangan berjangka.
02.03	Data pertanian	Data yang mempresentasikan bidang pertanian termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, ketahanan pangan, serta karantina dan keamanan hayati.
02.04	Data perkebunan	Data yang mempresentasikan bidang perkebunan termasuk di dalamnya pengelolaan tanaman perkebunan, keberlanjutan usaha perkebunan, pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan, dukungan

		terhadap ketahanan pangan, dan pengembangan bio energi.
02.05	Data peternakan	Data yang mempresentasikan bidang peternakan termasuk di dalamnya benih dan bibit ternak, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen peternakan, produksi pakan dan ternak, perikanan budidaya, dan dukungan terhadap ketahanan pangan.
02.06	Data perikanan	Data yang mempresentasikan bidang perikanan termasuk di dalamnya karantina perikanan, pengelolaan hasil perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan dukungan terhadap ketahanan pangan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.07	Data badan usaha milik negara	Data yang mempresentasikan pengelolaan badan usaha milik negara termasuk di dalamnya keberlanjutan badan usaha milik negara, dan penguatan daya saing dan kesinergian badan usaha milik negara.
02.08	Data investasi	Data yang mempresentasikan pembinaan penanaman modal antara lain manajemen penanaman modal, manajemen perizinan penanaman modal, dan litigasi penanaman modal.
02.09	Data koperasi	Data yang mempresentasikan pembinaan koperasi termasuk di dalamnya kelembagaan koperasi, pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi, pemberdayaan dan pembiayaan koperasi, serta pengawasan koperasi.
02.10	Data usaha kecil dan menengah	Data yang mempresentasikan pembinaan usaha kecil dan menengah termasuk di dalamnya kelembagaan, pengelolaan produksi dan pemasaran, serta pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

02.11	Data pariwisata	Data yang mempresentasikan bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan dan penyusunan rencana induk kepariwisataan nasional.
<b>Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)</b>		
03.01	Data pekerjaan umum	Data yang mempresentasikan bidang pekerjaan umum termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum, pembinaan jasa konstruksi, pengelolaan air limbah domestik, dan pengelolaan sumber daya air.
03.02	Data transmigrasi	Data yang mempresentasikan bidang transmigrasi termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kawasan transmigrasi.
03.03	Data transportasi	Data yang mempresentasikan bidang transportasi termasuk di dalamnya pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi, dan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.
03.04	Data perumahan	Data yang mempresentasikan bidang perumahan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, dan penyelenggaraan perumahan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
03.05	Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Data yang mempresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, termasuk di dalamnya pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan daerah tertentu.

03.06	Data pertanahan	Data yang mempresentasikan bidang pertanahan termasuk di dalamnya kebijakan hukum pertanahan, kebijakan pengadaan tanah, tata ruang tanah, litigasi pertanahan dan pengelolaan infrastruktur pertanahan.
03.07	Data kependudukan	Data yang mempresentasikan kependudukan termasuk di dalamnya pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.
<b>Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)</b>		
04.01	Data kesehatan	Data yang mempresentasikan bidang kesehatan termasuk di dalamnya kefarmasian dan alat kesehatan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta pengawasan obat dan makanan.
04.02	Data sosial	Data yang mempresentasikan bidang sosial termasuk di dalamnya manajemen pencarian dan pertolongan, manajemen sosial, pembangunan manusia, penanganan fakir miskin, dan penanggulangan bencana.
04.03	Data pemberdayaan perempuan	Data yang mempresentasikan bidang pemberdayaan perempuan termasuk di dalamnya kesetaraan gender, perlindungan anak, perlindungan hak perempuan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.
<b>Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)</b>		
05.01	Data hukum	Data yang mempresentasikan bidang hukum termasuk di dalamnya peraturan dan perundang-undangan, pengelolaan masyarakatan, penyelenggaraan keimigrasian, dan penyelenggaraan peradilan.

05.02	Data keamanan	Data yang mempresentasikan bidang keamanan termasuk didalamnya ketertarikan, ketertiban umum, pengayoman masyarakat, penanggulangan transnasional dan terorisme, dan penegakan hukum.
05.03	Data hak asasi manusia	Data yang mempresentasikan bidang hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak atas kekayaan intelektual.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
<b>Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)</b>		
06.01	Data pendidikan	Data yang mempresentasikan bidang pendidikan termasuk di dalamnya manajemen tenaga pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, dan pembinaan kepastakaan.
06.02	Data ketenagakerjaan	Data yang mempresentasikan bidang ketenagakerjaan termasuk di dalamnya manajemen pekerja migran Indonesia serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
06.03	Data ilmu pengetahuan	Data yang mempresentasikan bidang ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya penelitian ilmu dasar, penelitian inter dan multi disiplin, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan sektor tertentu, pengkordinasian sistem nasional ilmu pengetahuan.
06.04	Data teknologi	Data yang mempresentasikan bidang teknologi termasuk di dalamnya pengelolaan invensi dan invasi, penginderaan jauh, teknologi penerbangan dan antariksa, tenaga nuklir, pengkajian dan penerapan teknologi, pengkordinasian sistem nasional teknologi.

06.05	Data pemuda	Data yang mempresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.06	Data olahraga	Data yang mempresentasikan bidang keolahragaan termasuk di dalamnya pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
<b>Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)</b>		
07.01	Data pertambangan	Data yang mempresentasikan bidang pertambangan termasuk di dalamnya geologi, sumber daya mineral seperti batubara, minyak, dan gas bumi.
07.02	Data energi	Data yang mempresentasikan bidang energi termasuk di dalamnya energi baru dan terbarukan, ketenagalistrikan, serta konservasi energi.
07.03	Data kehutanan	Data yang mempresentasikan bidang kehutanan termasuk di dalamnya pengelolaan hutan dan hasilnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung serta perlindungan kawasan hutan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
07.04	Data kelautan	Data yang mempresentasikan bidang kelautan termasuk di dalamnya kemaritiman, tata ruang laut, pemberdayaan masyarakat kelautan, dan sumber daya kelautan.
07.05	Data lingkungan hidup	Data yang mempresentasikan bidang lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya alam dan ekosistem, pelestarian lingkungan hidup, manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca.
<b>Informasi Budaya dan agama (08)</b>		

08.01	Data agama	Data yang mempresentasikan bidang agama termasuk di dalamnya bimbingan masyarakat keagamaan, pendidikan agama dan pelatihan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umroh, serta sertifikasi produk halal.
08.02	Data kebudayaan	Data yang mempresentasikan bidang kebudayaan termasuk di dalamnya kesejarahan, pelestarian cagar budaya, manajemen budaya, pengembangan sastra Indonesia, dan pembinaan perfilman nasional.
<b>Informasi Pemerintahan Umum (09)</b>		
09.01	Data dalam negeri	Data yang mempresentasikan urusan dalam negeri termasuk di dalamnya kebijakan politik dan pemerintahan umum, pembinaan otonomi daerah, pemerintahan daerah, pembinaan keuangan daerah, dan pelaksanaan program prioritas nasional terkait pembinaan di daerah.
09.02	Data keuangan	Data yang mempresentasikan bidang keuangan negara termasuk di dalamnya fiskal, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan, manajemen perekonomian, pengadaan dan manajemen aset, serta pengelolaan pajak.
09.03	Data informasi	Data yang mempresentasikan bidang informasi termasuk di dalamnya pengelolaan sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan informasi publik, penyelenggaraan informatika, tata kelola aplikasi informatika, pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.
09.04	Data komunikasi	Data yang mempresentasikan bidang komunikasi termasuk di dalamnya pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos, serta penyelenggaraan pos.

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur</b>
09.05	Data perencanaan pembangunan nasional	Data yang mempresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan, strategi pembangunan nasional, pengelolaan program kerja organisasi, dan dukungan strategis program/kebijakan.
09.06	Data aparatur negara	Data yang mempresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di dalamnya pengelolaan dukungan organisasi, manajemen aparatur sipil negara, kelembagaan, pembinaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, manajemen pelayanan publik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, kearsipan nasional, dan pengawasan aparatur negara.
09.07	Data kesekretariatan negara	Data yang mempresentasikan bidang kesekretariatan negara termasuk di dalamnya kerumahtanggaan kepresidenan, koordinasi dengan lembaga negara, ketahanan nasional, manajemen pimpinan tinggi, pengawasan pemerintahan, pengkajian strategis, dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
<b>Data Pendukung Umum (10)</b>		
10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data yang mempresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang mempresentasikan informasi terkait kegiatan.
10.03	Data Kewilayahan	Data yang mempresentasikan informasi kewilayahan.

10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang mempresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.
-------	---------------------	--

### Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL - 03)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
<b>Layanan Publik (01)</b>		
01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan, intelejen, penanggulangan ancaman, pertahanan siber.
01.02	Urusan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
01.03	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan antara lain kelembagaan negara,

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		nilai-nilai kebangsaan, pemasyarakatan UUD 45 dan Pancasila, dan pembangunan manusia Indonesia
01.04	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri, termasuk di dalamnya ketahanan industri, pengelolaan struktur industri, pengelolaan standar nasional, penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital, dan pengelolaan iklim usaha.

01.05	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam pengelolaan perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, pemberdayaan konsumen, standardisasi dan pengendalian mutu, serta perdagangan berjangka.
01.06	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, ketahanan pangan, serta karantina dan keamanan hayati.
01.07	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan termasuk di dalamnya pengelolaan tanaman perkebunan, keberlanjutan usaha perkebunan, pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan, dukungan terhadap ketahanan pangan, dan pengembangan bio energi.
01.08	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan termasuk di dalamnya benih dan bibit ternak, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen peternakan, produksi pakan dan ternak, perikanan budidaya, dan dukungan terhadap ketahanan pangan.
01.09	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan termasuk di dalamnya karantina perikanan, pengelolaan hasil perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan dukungan terhadap ketahanan pangan.
01.10	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam pengelolaan badan usaha milik negara termasuk di dalamnya keberlanjutan badan usaha milik negara, dan penguatan daya saing dan kesinergian badan usaha milik negara.
01.11	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan penanaman modal antara lain manajemen penanaman modal, manajemen perizinan penanaman modal, dan litigasi penanaman modal.

<b>01.12</b>	<b>Koperasi</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam pembinaan koperasi termasuk di dalamnya kelembagaan koperasi, pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi, pemberdayaan dan pembiayaan koperasi, serta pengawasan koperasi.</b>
<b>01.13</b>	<b>Usaha Kecil Dan Menengah</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam pembinaan usaha kecil dan menengah termasuk di dalamnya kelembagaan, pengelolaan produksi dan pemasaran, serta</b>

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur</b>
		<b>pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.</b>
<b>01.14</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan dan penyusunan rencana induk kepariwisataan nasional.</b>
<b>01.15</b>	<b>Perizinan dan Akreditasi</b>	<b>Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi usaha</b>
<b>01.16</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum, pembinaan jasa konstruksi, pengelolaan air limbah domestik, dan pengelolaan sumber daya air.</b>
<b>01.17</b>	<b>Transmigrasi</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kawasan transmigrasi.</b>
<b>01.18</b>	<b>Transportasi</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi termasuk di dalamnya pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi, dan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.</b>

01.19	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, dan penyelenggaraan perumahan.
01.20	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, termasuk di dalamnya pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan daerah tertentu.
01.21	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan termasuk di dalamnya kebijakan hukum pertanahan, kebijakan pengadaan tanah, tata ruang tanah, litigasi pertanahan dan pengelolaan infrastruktur pertanahan.
01.22	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan termasuk di dalamnya pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.
01.23	Pemerintahan daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum antara lain pembangunan nasional, otonomi daerah, hubungan masyarakat, pengayoman masyarakat, dan program prioritas nasional terkait pembinaan di daerah
01.24	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan termasuk di dalamnya kefarmasian dan alat kesehatan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta pengawasan obat dan makanan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
01.25	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial termasuk di dalamnya manajemen pencarian dan pertolongan, manajemen sosial, pembangunan manusia, penanganan fakir miskin, dan penanggulangan bencana.
01.26	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan termasuk di dalamnya kesetaraan gender, perlindungan anak, perlindungan hak perempuan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.
01.27	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum termasuk di dalamnya peraturan dan perundang-undangan, pengelolaan masyarakat, penyelenggaraan keimigrasian, dan penyelenggaraan peradilan.
01.28	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan termasuk didalamnya ketentraman, ketertiban umum, pengayoman masyarakat, penanggulangan transnasional dan terorisme, dan penegakan hukum.
01.29	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak atas kekayaan intelektual.
01.30	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan termasuk di dalamnya manajemen tenaga pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, dan pembinaan kepastakaan.
01.31	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan termasuk di dalamnya manajemen pekerja migran Indonesia serta pembinaan keselamatan dan kesehatan

		<b>kerja.</b>
<b>01.32</b>	<b>Ilmu Pengetahuan</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya penelitian ilmu dasar, penelitian inter dan multi disiplin, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan sektor tertentu, pengkordinasian sistem nasional ilmu pengetahuan.</b>
<b>01.33</b>	<b>Teknologi</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang teknologi termasuk di dalamnya pengelolaan invensi dan invasi, penginderaan jauh, teknologi penerbangan dan antariksa, tenaga nuklir, pengkajian dan penerapan teknologi, pengkordinasian sistem nasional teknologi.</b>
<b>01.34</b>	<b>Pemuda</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.</b>
<b>01.35</b>	<b>Olahraga</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan termasuk di dalamnya pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.</b>
<b>01.36</b>	<b>Pertambangan</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan termasuk di dalamnya geologi, sumber daya mineral seperti batubara, minyak, dan gas bumi.</b>
<b>01.37</b>	<b>Energi</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang energi termasuk di dalamnya energi baru dan terbarukan, ketenagalistrikan, serta konservasi energi.</b>

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur</b>
<b>01.38</b>	<b>Kehutanan</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan termasuk di dalamnya pengelolaan hutan dan hasilnya, peningkatan daya dukung daerah aliran</b>

		<b>sungai (DAS) dan hutan lindung serta perlindungan kawasan hutan.</b>
<b>01.39</b>	<b>Kelautan</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan termasuk di dalamnya kemaritiman, tata ruang laut, pemberdayaan masyarakat kelautan, dan sumber daya kelautan.</b>
<b>01.40</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya alam dan ekosistem, pelestarian lingkungan hidup, manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca.</b>
<b>01.41</b>	<b>Agama</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang agama termasuk di dalamnya bimbingan masyarakat keagamaan, pendidikan agama dan pelatihan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umroh, serta sertifikasi produk halal.</b>
<b>01.42</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan termasuk di dalamnya kesejarahan, pelestarian cagar budaya, manajemen budaya, pengembangan sastra Indonesia, dan pembinaan perfilman nasional.</b>
<b>01.43</b>	<b>Informasi</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi termasuk di dalamnya pengelolaan sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan informasi publik, penyelenggaraan informatika, tata kelola aplikasi informatika, pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.</b>
<b>01.44</b>	<b>Komunikasi</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi termasuk di dalamnya pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos, serta penyelenggaraan pos.</b>
<b>Layanan Administrasi Pemerintahan (02)</b>		

<b>02.01</b>	<b>Dalam Negeri</b>	<b>Kegiatan pelayanan bidang dalam negeri termasuk di dalamnya kebijakan politik dan pemerintahan umum, pembinaan otonomi daerah, pemerintahan daerah, pembinaan keuangan daerah, dan pelaksanaan program prioritas nasional terkait pembinaan di daerah.</b>
<b>02.02</b>	<b>Keuangan</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara termasuk di dalamnya fiskal, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan, manajemen perekonomian, pengadaan dan manajemen aset, serta pengelolaan pajak.</b>
<b>02.03</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Nasional</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan, strategi pembangunan nasional,</b>

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur</b>
		<b>pengelolaan program kerja organisasi, dan dukungan strategis program/kebijakan.</b>
<b>02.04</b>	<b>Aparatur Negara</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di dalamnya pengelolaan dukungan organisasi, manajemen aparatur sipil negara, kelembagaan, pembinaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, manajemen pelayanan publik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, kearsipan nasional, dan pengawasan aparatur negara.</b>
<b>02.05</b>	<b>Kesekretaria tan Negara</b>	<b>Kegiatan pelayanan dalam bidang sekretariat negara termasuk di dalamnya kerumahtanggaan kepresidenan, koordinasi dengan lembaga negara, ketahanan nasional, manajemen pimpinan tinggi, pengawasan pemerintahan, pengkajian strategis, dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan.</b>

02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi.
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja.
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan, termasuk didalamnya manajemen SPBE, pengkoordinasian kegiatan lintas organisasi/instansi, pelayanan terkait kebijakan organisasi/instansi, serta kerjasama baik antar instansi ataupun dengan pihak lain
02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi termasuk didalamnya pengelolaan perangkat keras, dan pengelolaan sistem informasi.

#### **Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA - 04)**

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
<b>Aplikasi Umum (01)</b>		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung administrasi pemerintahan.
<b>Aplikasi Khusus (02)</b>		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur</b>
		<b>kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan IPPD lain, untuk mendukung misi tertentu.</b>
<b>02.02</b>	<b>Aplikasi Fungsi Tertentu</b>	<b>Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi IPPD lain.</b>

### **Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI - 05)**

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur</b>
<b>Fasilitas Komputasi (01)</b>		
<b>01.01</b>	<b>Pusat Data Nasional</b>	<b>Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data</b>
<b>01.02</b>	<b>Pusat Komputasi</b>	<b>Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu</b>
<b>01.03</b>	<b>Pusat Kendali</b>	<b>Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem</b>
<b>Sistem Integrasi (02)</b>		
<b>02.01</b>	<b>Jaringan Intra Pemerintah</b>	<b>Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi</b>
<b>02.02</b>	<b>Sistem Penghubung</b>	<b>Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan</b>

	<b>Layanan Pemerintah</b>	
<b>Platform (03)</b>		
<b>03.01</b>	<b>Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi</b>	<b>Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi</b>
<b>03.02</b>	<b>Komputasi Awan</b>	<b>Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi <i>cloud</i> untuk lingkungan kerja aplikasi</b>

### **Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK - 06)**

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur</b>
<b>Standar Keamanan (01)</b>		
<b>01.01</b>	<b>Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE</b>	<b>Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE.</b>
<b>01.02</b>	<b>Standar Keamanan Internasional</b>	<b>Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.</b>

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur</b>
<b>01.03</b>	<b>Regulasi lainnya</b>	<b>Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE.</b>
<b>Penerapan Keamanan (02)</b>		

02.01	<b>kesadaran Keamanan SPBE</b>	<b>Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.</b>
02.02	<b>kerentanan Keamanan SPBE</b>	<b>Bentuk kegiatan di IPPD untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.</b>
02.03	<b>peningkatan Keamanan SPBE</b>	<b>Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan keamanan SPBE.</b>
02.04	<b>penanganan insiden Keamanan SPBE</b>	<b>Bentuk kegiatan di IPPD untuk menanggulangi, memulihkan dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.</b>
<b>Kelaikan Keamanan (03)</b>		
03.01	<b>Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum</b>	<b>Uji kelaikan keamanan terhadap aplikasi umum yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional.</b>  <b>Output dari kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.</b>
03.02	<b>Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional</b>	<b>Uji kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Infrastruktur SPBE Nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.</b>